



## Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan

Regina Rambu Lika Rawambaku<sup>1</sup>, Anthon Simon Y. Kerih<sup>2</sup>, Siprianus G. Tefa<sup>3</sup>  
Universitas Nusa Cendana<sup>1,2,3</sup>

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [ginarawambaku@gmail.com](mailto:ginarawambaku@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in the management of village finances in Kota SoE Subdistrict, South Central Timor Regency. The implementation of Siskeudes is expected to enhance transparency, accountability, and efficiency in village financial management. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The result of the study indicate that the implementation of Siskeudes in Kota SoE Subdistrict has been running well, although there are still some obstacles such as the lack of understanding among village officials about the system and limited supporting infrastructure. Nevertheless, Siskeudes has had a positive impact on village financial management, such as improving the quality of financial reporting and supervision. This study recommends increasing training and socialization for village officials and improving infrastructure to support the optimal implementation of Siskeudes in the future.*

**Keywords:** *Village Financial System, Village Financial Management, Transparency and accountability.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penerapan Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Kecamatan Kota SoE telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman aparat desa terhadap sistem tersebut dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, Siskeudes telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi aparat desa serta perbaikan infrastruktur untuk mendukung optimalisasi penerapan Siskeudes di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas.

### 1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa ditengah air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk memenuhi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan dana desa tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan Visi-Misi Presiden Joko Widodo

dengan 9 Agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa. Implikasi kebijakan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.(Dedy, 2019)

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri membuat *Memory of Understanding* (MOU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ & MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Hasil dari kerja sama itu adalah berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDesa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa batas waktu pelaporan keuangan desa yakni 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Penerapan aplikasi Siskeudes dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes. Dalam penjelasan Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Pieter yang dilansir dari situs resmi [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) saat membuka “Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.2” di Aula Mutis Kantor Bupati Timor Tengah Selatan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa implementasi Siskeudes pada Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah berjalan namun belum menjangkau semua desa karena kendala jaringan listrik dan internet ke seluruh desa. Ada pula kendala transportasi dan komunikasi mengingat topografi dan letak desa

yang terpencil sehingga menghambat koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa. SDM aparatur desa yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam implementasi Siskeudes.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah 3.955,36 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 461.681 jiwa, serta merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah Kecamatan dan Desa terbanyak pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES di beberapa Desa termasuk pada Desa Kuatae dan Desa Noemeto di Kecamatan Kota Soe. Berbagai potensi kesalahan dalam mengelola Dana Desa bisa terjadi dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban. hingga pelaporannya. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dari segi keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis dan pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini, penelitian menggunakan jenis pendekatan deskriptif untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai kewajiban berdasarkan peraturan hukum, Desa Kuatae dan Desa Noemeto di Kecamatan Kota Soe menerapkan (Siskeudes) dalam tata pengelolaan keuangan desanya dan bagaimana sistem pengelolaan akuntansi keuangan desa dengan adanya support dari Siskeudes ini.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

## **3. HASIL PENELITIAN**

### **Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota SoE**

Aplikasi Siskeudes di kecamatan Kota Soe sudah terhitung cukup lama di mana pada Desa Kuatae dan Desa Noemeto sudah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2017. Salah satu masalah yang sering muncul dalam mengoperasikan aplikasi ini adalah kendala dalam

pengoperasian aplikasi tersebut di mana jaringan di desa tidak memadai sehingga sering terjadinya penundaan dalam penginputan data dalam pengelolaan keuangan. Link aplikasi Siskeudes hanya satu dan diakses oleh ratusan desa yang ada di Kabupaten TTS. Hal ini juga termasuk kendala karena jika pada saat penginputan, seluruh desa mengakses link tersebut, maka dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan laporan pertanggung jawaban dan juga penambahan akses jaringan internet di desa pada kecamatan Kota Soe agar bisa mengakses aplikasi Siskeudes dengan baik dan lancar.

Aplikasi Siskeudes ini sangat membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam pembuatan laporan keuangan desa yang jadi lebih efektif dan efisien karena setelah melakukan input data dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya seperti : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan Pmk Nomor 247 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang mana dengan ini laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang di tetapkan.

### **Penerapan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Desa Kuatae dan Desa Noemeto**

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe, memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui beberapa gambaran penerapannya. Pertama efektivitas penerapan Siskeudes, Desa Kuatae dan Desa Noemeto telah menerapkan Siskeudes untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan desa. Sistem ini membantu aparat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Aplikasi ini memfasilitasi penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan desa menjadi lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penggunaan Siskeudes di kedua desa telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan rinci, memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi terkait anggaran desa. Hal ini, juga meningkatkan akuntabilitas karena semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat diperiksa oleh lembaga pengawas, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Ada beberapa keterbatasan dalam mengaplikasikan Siskeudes di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, diantaranya yaitu akses internet yang belum stabil di kedua desa menjadi tantangan dalam operasional aplikasi Siskeudes, terutama saat proses input data dan sinkronisasi sistem dengan pemerintah pusat. Tidak semua aparat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi ini. Beberapa aparat membutuhkan pelatihan lebih lanjut agar dapat menggunakan Siskeudes dengan optimal.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto dalam penerapannya dalam menggunakan Aplikasi Siskeudes dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

### **Hambatan atau Kendala dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota SoE**

Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi di bidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup baik dan cukup efektif dalam membantu Pemerintah Desa Kuatae dan Desa Noemeto dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara online, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahapan pengelolaan keuangan desa tetap akan menggunakan sistem offline. Di dalam penggunaan aplikasi ini, Pemerintah Desa sendiri sudah menerapkannya dengan baik dan Pemerintah Desa merasa terbantu dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Dalam menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, beberapa aparat desa sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola setiap tahapan dalam penginputan data.

Beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi Siskeudes diantaranya keterbatasan infrastruktur teknologi, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah akses internet yang terbatas di Desa Kuatae dan Desa Noemeto. Karena Siskeudes adalah aplikasi berbasis digital, koneksi internet yang stabil sangat dibutuhkan. Di beberapa wilayah desa, sinyal internet masih lemah atau tidak tersedia, sehingga menghambat proses input data dan pelaporan secara daring. Khususnya di Desa Noemeto masih juga mengalami keterbatasan peralatan komputer dan perangkat pendukung lainnya dilihat dari kondisi Kantor Desa yang masih belum 100% layak untuk dioperasikan. Hambatan lain juga pada kompetensi sumber daya manusia. Aparat desa di Kuatae dan Noemeto sering kali mengalami kendala mengoperasikan aplikasi karena kurangnya pelatihan teknis. Desa-desa ini masih sangat tergantung pada individu tertentu yang lebih memahami teknologi, jika mereka tidak ada maka

pengelolaan keuangan desa menjadi terhamabat. Desa Kuatae dan Desa Noemeto juga sering mengalami kendala sinkronasi data ke tingkat kabupaten atau pusat, terutama karena masalah jaringan dan kesalahan teknis dalam sistem. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa dan pemantauan dari pemerintah kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara maka untuk dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut pemerintah daerah perlu memastikan bahwa akses internet dan perangkat teknologi di desa-desa diperbaiki agar Siskeudes dapat dijalankan dengan lancar. Perlu adanya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk aparat desa guna meningkatkan keterampilan mereka dalam mengoperasikan Siskeudes. Dengan mengatasi hambatan atau kendala tersebut, penerapan Siskeudes di Desa Kuatae dan Desa Noemeto diharapkan dapat berjalan lebih baik dan mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota SoE**

Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu aparat desa dalam mengelola seluruh proses keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan realisasi anggaran.

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kuatae dan Desa Noemeto berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa gambaran penerapannya. Pertama efektivitas penerapan Siskeudes, Desa Kuatae dan Desa Noemeto telah menerapkan Siskeudes untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan desa. Sistem ini membantu aparat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Aplikasi ini memfasilitasi penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan desa menjadi lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penggunaan Siskeudes di kedua desa telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan rinci, memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi terkait anggaran desa. Hal ini, juga meningkatkan akuntabilitas karena semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat diperiksa oleh lembaga pengawas, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto sudah sejalan dengan menurut Teori TAM (*Theory Technology Acceptance*

*Model*). TAM mengukur sejauh mana penerimaan teknologi baru oleh pengguna berdasarkan dua faktor utama. Pertama *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan), mengacu pada sejauh mana aparat desa percaya bahwa penggunaan Siskeudes dapat meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian di kecamatan Kota Soe menunjukkan bahwa Siskeudes dipandang sangat berguna oleh aparat desa. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat utama yaitu efisiensi dalam penyusunan APBDes, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Aparat desa di kecamatan Kota Soe merasakan manfaat langsung dari Siskeudes, seperti mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan, yang membuat sistem ini dinilai sangat berguna. Kedua *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan), persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada seberapa mudah Siskeudes dioperasikan oleh pengguna. Dalam konteks Kecamatan Kota Soe, penerapan Siskeudes menghadapi beberapa tantangan terkait kemudahan penggunaannya yaitu keterbatasan kompetensi SDM dan juga hambatan teknologi. Penerapan Siskeudes meskipun dirancang agar mudah digunakan, tantangan ini menurunkan *perceived ease of use* di Desa Kuatae dan Desa Noemeto. Namun, dengan peningkatan pelatihan dan infrastruktur, persepsi kemudahan penggunaan dapat ditingkatkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Nenobais (2019) tentang “Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya efektif di Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditentukan tahapan pengelolaan keuangan desa, dijanjikan mampu memberikan penyempurnaan rancangan program, pelaksanaan, upaya pengelolaan, laporan termasuk laporan pertanggungjawaban. Penelitian lainnya oleh Seni (2020) tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi kasus di Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh negatif pada sistem keuangan desa.

### **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota SoE**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe telah menerapkan aplikasi ini mulai tahun 2017 dengan dilakukan bimbingan dan pelatihan terlebih dahulu agar operator yang ditunjuk dapat menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Kuatae dan Desa Noemeto sampai saat ini sudah cukup efektif untuk membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dapat

dilihat dari output penggunaan aplikasi ini yaitu dalam proses pelaporan. Dalam proses pelaporan ini, laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan dapat dibuat atau dilaporkan secara tepat waktu dengan laporan yang sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di kantor Desa Kuatae dan Desa Noemeto, didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan yaitu sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang cukup baik sesuai dengan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*). Hasil penelitian di kecamatan Kota Soe menunjukkan bahwa Siskeudes dipandang sangat berguna oleh aparat desa. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat utama yaitu efisiensi dalam penyusunan APBDes, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Aparat desa di kecamatan Kota Soe merasakan manfaat langsung dari Siskeudes, seperti mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan, yang membuat sistem ini dinilai sangat berguna.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asih, dkk (2020) Tentang Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Siskeudes versi 2.0.3 sudah dilakukan secara terstruktur, (2) Kualitas akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel, (3) Dampak positif Siskeudes terhadap pemerintah desa yang dirasakan secara langsung oleh para pegawai desa di desa Kalibukbuk.

2. Tahap Penganggaran.

Berdasarkan hasil penelitian proses penganggaran pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang cukup baik sesuai dengan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*). Hasil penelitian di kecamatan Kota Soe menunjukkan bahwa Siskeudes dipandang sangat berguna oleh aparat desa. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat utama yaitu efisiensi dalam penyusunan APBDes, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Aparat desa di kecamatan Kota Soe merasakan manfaat langsung dari Siskeudes, seperti mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan, yang membuat sistem ini dinilai sangat berguna.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2023) yang hasilnya mengatakan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa



semuanya sangat akuntabel dan transparan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahap ini sudah membaik.

### 3. Tahap Penatausahaan.

Berdasarkan hasil penelitian proses penatausahaan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang cukup baik sesuai dengan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*). Hasil penelitian di kecamatan Kota Soe menunjukkan bahwa Siskeudes dipandang sangat berguna oleh aparat desa. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat utama yaitu efisiensi dalam penyusunan APBDes, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Aparat desa di kecamatan Kota Soe merasakan manfaat langsung dari Siskeudes, seperti mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan, yang membuat sistem ini dinilai sangat berguna.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Nyoria, dkk (2023) tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Melintang dinilai lebih baik karena telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada kepala desa maupun kepada masyarakat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 4. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang cukup baik sesuai dengan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*). Hasil penelitian di kecamatan Kota Soe menunjukkan bahwa Siskeudes dipandang sangat berguna oleh aparat desa. Hal ini tercermin dari beberapa manfaat utama yaitu efisiensi dalam penyusunan APBDes, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Aparat desa di kecamatan Kota Soe merasakan manfaat langsung dari Siskeudes, seperti mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan, yang membuat sistem ini dinilai sangat berguna.

Dalam konteks Kecamatan Kota Soe, penerapan Siskeudes menghadapi beberapa tantangan terkait kemudahan penggunaannya yaitu keterbatasan kompetensi SDM dan juga hambatan teknologi. Siskeudes dirancang agar mudah digunakan, namun tantangan ini menurunkan *perceived ease of use* di Desa Kuatae dan Desa Noemeto. Dengan adanya peningkatan pelatihan dan infrastruktur, persepsi kemudahan penggunaan dapat ditingkatkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seni, dkk (2020) bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap sistem keuangan desa. Kegunaan aplikasi berpengaruh negatif pada sistem keuangan desa serta minat perilaku berperilaku positif terhadap sistem keuangan desa.

## **Hambatan atau Kendala dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe**

Dalam penerapan aplikasi Siskeudes terdapat beberapa hambatan atau kendala yang sering dihadapi diantaranya, (1) Kurangnya pemahaman teknologi. Tidak semua aparatur desa memiliki pemahaman yang memadai terkait penggunaan teknologi, sehingga pengoperasian aplikasi Siskeudes tidak terlalu efisien. (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Aparat desa sering kekurangan staff yang kompeten dalam bidang administrasi keuangan berbasis aplikasi. (3) koneksi internet terbatas. Aplikasi Siskeudes memerlukan akses internet yang stabil, sementara di Desa Kuatae dan Desa Noemeto jaringan internet masih belum memadai. (4) Masalah teknis pada aplikasi. Aplikasi terkadang mengalami gangguan teknis atau error yang memperlambat proses pengelolaan keuangan desa. Agar pemerintah desa dapat mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah.

Hasil penelitian terkait hambatan atau kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe sudah sejalan dengan *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*. Menurut TAM, dua faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi adalah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Hambatan dalam kedua faktor ini dapat menghalangi penerimaan dan penggunaan sistem baru.

### 1) Persepsi kegunaan

Kurangnya pemahaman tentang manfaat: Beberapa aparatur desa mungkin belum memahami dengan baik manfaat Siskeudes dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Minimnya dukungan sosial dan organisasi: dukungan yang kurang dari pemerintah desa atau pimpinan desa dapat mempengaruhi persepsi aparatur tentang pentingnya penggunaan aplikasi ini sehingga aplikasi kurang diterima.

### 2) Persepsi kemudahan penggunaan

Kurangnya keterampilan teknologi: aparat desa mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan Siskeudes karena kurangnya pelatihan atau pemahaman teknologi. Hal ini menciptakan persepsi bahwa aplikasi tersebut sulit untuk digunakan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi: terbatasnya akses internet atau perangkat komputer yang kurang memadai dapat membuat aparatur desa merasa bahwa penggunaan aplikasi tersebut sulit, sehingga enggan untuk menggunakannya.

3) Faktor eksternal

Kondisi Infrastruktur: keterbatasan jaringan internet didaerah pedesaan, serta kurangnya dukungan teknis, menjadi hambatan eksternal yang berpengaruh kepada kedua aspek persepsi kegunaan dan kemudahan

Kebijakan dan regulasi: kebijakan yang tidak jelas atau kurangnya pedoman operasional untuk penggunaan Siskeudes bisa memengaruhi penerimaan teknologi ini ditingkat desa.

Sejalan dengan penjelasan ini maka dengan mempertimbangkan teori TAM, solusi untuk menghadapi hambatan ini termasuk pelatihan yang lebih intensif, peningkatan infrastruktur teknologi, serta dukungan yang lebih besar dari pimpinan desa dan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buulolo, dkk (2022) bahwa dalam pengoperasian Siskeudes masih terdapat hambatan atau kendala yang tidak berpengaruh secara signifikan, salah satunya adalah adanya kesalahan sistem pada saat digunakan. Sistem keuangan desa sangat penting dalam pemerintahan desa di mana sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes memudahkan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu. Ini membantu dalam memnuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
2. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan seiring dengan penerapan Siskeudes telah meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah Pemerintah Desa merasa terbantu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi sehingga memberikan kemudahan dalam hal pelaporan secara tepat waktu dan pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini adalah adanya sistem yang error pada saat dilakukannya penginputan sehingga

menghambat proses tersebut. Kantor Desa juga belum memiliki akses jaringan internet sehingga saat penginputan data, operator sering memakai jaringan data dari ponsel sendiri

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Objek Penelitian
  - a. Pemerintah Desa diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan memberikan pelatihan tambahan bagi para pegawai yang tidak mengikuti pelatihan agar semua pegawai paham dan mampu mengoperasikan aplikasi ini serta untuk mencapai tujuan desa. Namun, tetap hanya satu pegawai yang ditunjuk sebagai operator.
  - b. Pemerintah Kabupaten TTS diharapkan dapat mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa dalam menjalankan program pelatihan yang menyeluruh di desa-desa agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.
  - c. Pemerintah Desa dapat lebih sering berkomunikasi kepada pemerintah setempat atau pendamping desa apabila terjadi error pada aplikasi sehingga dapat diminimalisir dengan baik kendala tersebut dan melakukan pengadaan jaringan wifi di Kantor Desa agar tidak terkendala jaringan saat penginputan data.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
  - a. Pendalaman faktor-faktor penghambat dan pendukung. Penelitian lebih lanjut dapat menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa, seperti kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, serta dukungan dari pemerintah daerah.
  - b. Evaluasi efektivitas sistem. Melakukan efektivitas penerapan sistem keuangan desa di Kecamatan Kota Soe dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa untuk melihat variasi penerapan dan hasilnya.
  - c. Studi perbandingan. Bandingkan penerapan Siskeudes di Kecamatan Kota Soe dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa untuk melihat variasi penerapan dan hasilnya.
  - d. Pengaruh pelatihan dan pemberdayaan aparat desa. Meneliti lebih dalam tentang peran pelatihan dan pemberdayaan aparat desa dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem keuangan desa.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Arenawati. (2014). *Administrasi pemerintah daerah*. Graha Ilmu.
- Bambang, S. (2011). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*. Fokus Media.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UIP.
- Morris, G. M., & A. (1997). How user perceptions influence software use. *IEEE*.
- Nain. (2017). *Relasi pemerintahan desa dan supra desa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar.
- Soleh, R. (2014). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokus Media.
- Susilo, B. (n.d.). Asas pengelolaan keuangan desa. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/asas-pengelolaan-keuanga-desa-4f903a99/detail/>

### Jurnal

- Artini. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa Tigawasa. *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 11.
- Davis, K. A. (1989). Technology acceptance model. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Dedy, N. (2019). Received November 3. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 53–62.
- Desy Nur Pratiwi. (2020). Analisis penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(02).
- Febri Lusiono, & Suharman. (2017). Analisis penerimaan aplikasi Siskeudes di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2). <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/535>
- Fitriani. (2018). Inovasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus kantor desa Sempu Kecamatan Ngebei Kabupaten Ponorogo). *E-journal Universitas Brawijaya*.
- I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, P. (2019). Pengaruh ketidaktepatwaktuan pelaporan keuangan berpengaruh pada reaksi pasar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10.

### Peraturan-Peraturan

- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 Terkait Aplikasi SISKEUDES. (2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).